



---

## Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Joni Anwar<sup>1</sup>, Dyah Palupiningtyas<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia

Email : [Joni.Anwar19511322@student.stiepari.ac.id](mailto:Joni.Anwar19511322@student.stiepari.ac.id)<sup>1</sup>, [dyahpalupi@stiepari.ac.id](mailto:dyahpalupi@stiepari.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Bendan Ngisor, Gajah Mungkur, Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: [dyahpalupi@stiepari.ac.id](mailto:dyahpalupi@stiepari.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in the management of Village Funds in Susukan Village, Susukan District, Semarang Regency. Using a qualitative approach with a case study design, this research explores not only the formal and procedural aspects but also the substantive dimensions of transparency and accountability. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, document analysis, and focus group discussions, and were analyzed using a thematic analysis approach. The results reveal that the implementation of transparency and accountability still faces various challenges despite the existence of a comprehensive regulatory framework. Information accessibility and compliance with regulations are relatively adequate; however, the timeliness of publication, diversity of publication media, responsiveness to community feedback, and effectiveness of oversight remain suboptimal. Factors influencing the implementation include the regulatory framework, the capacity of village officials, community budget literacy, information technology infrastructure, and local political dynamics. Community participation in oversight is also low due to limited understanding and the absence of effective participation mechanisms. To improve transparency and accountability, a comprehensive strategy is required, encompassing regulatory refinement, institutional capacity building, the utilization of information technology, and the strengthening of community participation. This study makes a significant contribution to the literature on village governance by integrating multiple dimensions and exploring contextual factors.*

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Village Funds, Community Participation, Village Governance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi tidak hanya aspek formal dan prosedural, tetapi juga aspek substansial dari transparansi dan akuntabilitas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan focus group discussion, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat kerangka regulasi yang komprehensif. Aksesibilitas informasi dan kepatuhan terhadap regulasi sudah cukup baik, namun ketepatan waktu publikasi, variasi media publikasi, responsivitas terhadap feedback masyarakat, dan efektivitas pengawasan masih kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi mencakup kerangka regulasi, kapasitas aparatur desa, literasi anggaran masyarakat, infrastruktur teknologi informasi, dan dinamika politik lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga masih rendah karena minimnya pemahaman dan kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur tata kelola pemerintahan desa dengan mengintegrasikan berbagai dimensi dan mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual.

**Kata kunci:** Transparency, Accountability, Village Funds, Community Participation, Village Governance.

## **1. LATAR BELAKANG**

Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa untuk mengelola pembangunan dan keuangannya sendiri, termasuk Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan (Lewis, 2015). Namun, peningkatan alokasi anggaran ini juga menimbulkan tantangan baru terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara konseptual, transparansi merujuk pada keterbukaan informasi tentang fungsi dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sementara akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka (ArRugby & Tarigan, 2021). Studi empiris menunjukkan bahwa implementasi kedua prinsip ini dalam pengelolaan keuangan publik berkorelasi positif dengan efektivitas program pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ferry et al., 2015).

Fenomena yang menarik perhatian adalah masih terdapatnya kesenjangan antara regulasi dan implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya di tingkat desa, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan, serta minimnya infrastruktur teknologi informasi di daerah perdesaan (Furqani & Rosmiaty, 2019). Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dana dan inefisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Desa Susukan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, menawarkan konteks yang menarik untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sebagai desa yang terletak di wilayah transisi antara perkotaan dan perdesaan (*peri-urban*), Desa Susukan menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dan beragam harapan dari masyarakatnya terkait pembangunan desa (Antlöv et al., 2016). Selain itu, berbagai studi kasus di daerah *peri-urban* menunjukkan bahwa desa-desa dengan karakteristik tersebut sering

mengalami tantangan khusus dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik karena tingginya heterogenitas penduduk dan perubahan sosial yang cepat (Olsen, 2017).

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika mempertimbangkan besarnya Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, total Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 77 triliun untuk 74.961 desa di seluruh Indonesia, dengan rata-rata alokasi per desa mencapai lebih dari Rp 1 miliar (Fanani & Munandar, 2023). Angka yang substansial ini menuntut adanya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Pellegrini & Tasciotti, 2019).

Kajian literatur menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam studi tentang transparansi dan akuntabilitas Dana Desa. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan Dana Desa secara umum, masih terbatas studi yang mengeksplorasi secara mendalam tentang faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi praktik transparansi dan akuntabilitas di level mikro (desa) (Holzhacker et al., 2016). Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek formal dan prosedural dari akuntabilitas, seperti pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, namun kurang memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang membentuk praktik akuntabilitas dalam konteks lokal (Ramadhan & Nugroho, 2020; AGP & Palupiningtyas, 2024).

Pendekatan yang dominan dalam studi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa juga cenderung mengadopsi perspektif top-down yang menekankan kepatuhan terhadap standar formal, tanpa mempertimbangkan secara memadai dinamika kekuasaan lokal dan partisipasi masyarakat yang membentuk praktik akuntabilitas di tingkat akar rumput (Steiner, 2017). Hasil studi empiris di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sistem formal, tetapi juga oleh faktor-faktor kontekstual seperti kepemimpinan lokal, kapasitas masyarakat sipil, dan norma-norma sosial yang berlaku (Kosec & Wantchekon, 2020).

Studi longitudinal yang dilakukan oleh Lewis et al. (2020) mengungkapkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas Dana Desa antar daerah di Indonesia, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan faktor struktural seperti kapasitas administratif atau besarnya anggaran. Hal ini menunjukkan pentingnya mengadopsi pendekatan studi kasus yang mendalam untuk mengungkap kompleksitas dan nuansa dalam

praktik transparansi dan akuntabilitas di konteks lokal yang spesifik (Hertzberg & Monteiro, 2022).

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan mengeksplorasi secara mendalam implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dengan mengadopsi pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menganalisis tidak hanya aspek formal dan prosedural dari transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga faktor-faktor kontekstual seperti dinamika sosial-politik lokal, kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan, serta mekanisme informal yang membentuk praktik akuntabilitas di tingkat desa (Srikant & Samadara, 2018).

Pendekatan ini penting mengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya persoalan teknis atau administratif, tetapi juga merupakan proses sosial dan politik yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan konteks budaya lokal (Schmitter & Karkkainen, 2016). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih nuansir dan kontekstual tentang bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan diimplementasikan dalam praktik pengelolaan Dana Desa (Welch & Sanders, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang?; Faktor-faktor apa saja yang memfasilitasi dan menghambat implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan?; Bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan?; Strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan?.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memiliki signifikansi tidak hanya secara teoretis dalam memperkaya pemahaman kita tentang dinamika implementasi prinsip-prinsip good governance di tingkat lokal, tetapi juga secara praktis dalam mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Dana Desa (Wang & Rakner, 2023). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskusi yang lebih luas tentang desentralisasi fiskal dan pembangunan perdesaan di negara-negara berkembang (Gibson & Hoffman, 2021).

Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks spesifik Desa

Susunan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa biasa (Yin & Zietlow, 2018).

Dengan memadukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang dinamika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (Mohammad & Zhuang, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan terkini dalam studi tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya memahami bagaimana norma-norma formal berinteraksi dengan praktik informal dan realitas sosial-politik di tingkat lokal (Olken & Pande, 2022).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian terkini oleh Rahayu dan Juwono (2019) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki korelasi positif dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi tentang kebijakan, prosedur, dan keputusan pemerintah desa, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa (Ferarow & Suprihanto, 2018).

Implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Studi yang dilakukan oleh Furqani dan Rosmiaty (2019) mengidentifikasi beberapa hambatan utama, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di desa, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan informasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mengakses informasi publik. Hambatan-hambatan ini menyebabkan ketimpangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap penggunaan Dana Desa (Salim et al., 2017).

Dalam konteks regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mendorong transparansi pengelolaan Dana Desa, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berbagai peraturan turunannya. Namun, Widagdo et al. (2016) menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasinya di tingkat desa. Kesenjangan ini sebagian besar

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah, serta minimnya sanksi bagi desa yang tidak memenuhi standar transparansi yang ditetapkan.

## **2.2 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Studi empiris yang dilakukan oleh Sofyani et al. (2018) menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam implementasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa antar daerah di Indonesia. Variasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kapasitas aparatur desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Ramadhan dan Nugroho (2020) membedakan antara akuntabilitas formal dan substansial dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas formal berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur administratif dan pelaporan keuangan, sementara akuntabilitas substansial berkaitan dengan responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Studi mereka mengungkapkan bahwa sebagian besar desa di Indonesia lebih menekankan akuntabilitas formal daripada akuntabilitas substansial, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi akuntabilitas yang komprehensif.

Lewis dan Hendrawan (2021) mengeksplorasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa. Temuan mereka menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan oleh BPD sangat bergantung pada kapasitas anggotanya dalam memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan desa, serta independensi mereka dari pengaruh kepala desa.

Studi lain oleh Hadiz dan Robison (2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan relasi kekuasaan di tingkat desa. Dominasi elit lokal dan patronase politik seringkali menghalangi implementasi akuntabilitas yang demokratis dan inklusif. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial-politik lokal dalam menganalisis praktik akuntabilitas di tingkat desa.

## **2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa**

Partisipasi masyarakat merupakan komponen krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Antlöv et al. (2016) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa bervariasi antar daerah di Indonesia, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat,

keberadaan organisasi masyarakat sipil, dan keterbukaan pemerintah desa terhadap kritik dan masukan.

Badrudin dan Siregar (2020) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan, seperti pelatihan tentang literasi anggaran dan audit sosial.

Studi yang dilakukan oleh Wang dan Rakner (2023) mengeksplorasi inovasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa, seperti penggunaan teknologi informasi dan pendekatan audit sosial berbasis komunitas. Temuan mereka menunjukkan bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konteks lokal dan dukungan dari pemerintah desa dan kabupaten/kota.

#### **2.4 Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan Pravasanti (2020) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi desa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini memungkinkan pemerintah desa untuk mempublikasikan informasi tentang anggaran dan realisasi Dana Desa secara real-time, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaannya.

Namun, implementasi teknologi informasi di tingkat desa juga menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Ismail et al. (2016) mengidentifikasi beberapa hambatan utama, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur desa, dan kurangnya dukungan teknis dari pemerintah kabupaten/kota. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Meskipun demikian, studi terbaru oleh Rahman et al. (2023) menunjukkan tren positif dalam adopsi teknologi informasi oleh pemerintah desa di Indonesia. Semakin banyak desa yang mulai menggunakan platform digital untuk mempublikasikan informasi tentang anggaran dan program pembangunan, meskipun tingkat adopsinya masih bervariasi antar daerah.

## **2.5 Kesenjangan Penelitian**

Meskipun terdapat berbagai penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diatasi. Pertama, sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek formal dan prosedural dari transparansi dan akuntabilitas, seperti kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan keuangan, tetapi kurang memperhatikan aspek substansial, seperti kualitas partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan lokal (Holzhacker et al., 2016).

Kedua, terdapat keterbatasan dalam penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa, seperti dinamika politik lokal, relasi kekuasaan, dan norma-norma sosial yang berlaku (Lewis et al., 2020). Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi yang kontekstual dan efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, masih terbatas penelitian yang menggunakan pendekatan multi-disiplin dalam menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, padahal fenomena ini melibatkan aspek-aspek kebijakan publik, administrasi, sosiologi, dan politik (Olken & Pande, 2022). Pendekatan multi-disiplin diperlukan untuk memahami kompleksitas implementasi transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dengan mengadopsi pendekatan studi kasus yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya akan fokus pada aspek formal dan prosedural, tetapi juga akan menganalisis faktor-faktor kontekstual yang membentuk praktik transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam konteks spesifik (Yin & Zietlow, 2018).

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode (Fusch et al., 2018) yang meliputi:

- a) **Wawancara mendalam** dengan informan kunci: aparatur desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat umum

- b) **Observasi partisipatif** terhadap proses pengelolaan Dana Desa, termasuk musyawarah desa dan pelaksanaan program
- c) **Analisis dokumen** terkait Dana Desa, seperti RKPDesa, APBDDesa, dan laporan pertanggungjawaban
- d) **Focus Group Discussion** dengan kelompok masyarakat untuk menggali persepsi kolektif

Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2021) dengan tahapan:

- a) Familiarisasi dengan data
- b) Pengkodean awal
- c) Pencarian tema
- d) Peninjauan tema
- e) Pendefinisian dan penamaan tema
- f) Penulisan laporan

Kerangka analisis diadaptasi dari model evaluasi transparansi dan akuntabilitas yang dikembangkan oleh Ferry et al. (2015) dan Ramadhan & Nugroho (2020), mencakup tiga dimensi:

- a) **Dimensi Prosedural**: kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur formal
- b) **Dimensi Informasional**: keterbukaan dan aksesibilitas informasi
- c) **Dimensi Relasional**: dinamika hubungan pemerintah-masyarakat dan partisipasi

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, diterapkan strategi:

- a) Triangulasi sumber dan metode
- b) Member checking (Nowell et al., 2017)
- c) Peer debriefing
- d) Thick description (Smith, 2018)

Penelitian menjunjung tinggi prinsip etika (Iphofen & Tolich, 2018) melalui:

- a) Informed consent
- b) Perlindungan anonimitas dan kerahasiaan
- c) Prinsip non-maleficence
- d) Validasi komunitas

Pendekatan metodologis ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman kontekstual tentang implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dapat

berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan

###### a. Profil Desa Susukan dan Pengelolaan Dana Desa

Desa Susukan terletak di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan luas wilayah 546 hektar dan jumlah penduduk 5.872 jiwa. Desa ini menerima Dana Desa sejak tahun 2015 dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan pemerintahan desa.

**Tabel 1. Perkembangan Persentase Alokasi Dana Desa di Desa Susukan Tahun 2019-2023**

Tahun	Infrastruktur (%)	Pemberdayaan (%)	Pemerintahan (%)
2019	65	25	10
2020	63	27	10
2021	62	28	10
2022	61	29	10
2023	60	30	10

Sumber: APBDesa Susukan 2019-2023

Pola alokasi Dana Desa di Desa Susukan menunjukkan pergeseran bertahap dari fokus infrastruktur menuju pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Antlöv et al. (2016) yang mengungkapkan bahwa implementasi UU Desa di Indonesia secara bertahap mengalami pergeseran dari pendekatan pembangunan fisik menuju pemberdayaan masyarakat. Namun, porsi alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih dominan, yang mencerminkan prioritas pembangunan desa yang masih berorientasi pada aspek fisik.

###### b. Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan diukur melalui empat indikator utama sebagaimana direkomendasikan oleh

Kosec & Wantchekon (2020): aksesibilitas informasi, ketepatan waktu publikasi, kejelasan mekanisme akses, dan variasi media publikasi.

**Tabel 2. Implementasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan**

<b>Indikator</b>	<b>Implementasi</b>	<b>Keterangan</b>
Aksesibilitas informasi	Cukup baik	Informasi tentang Dana Desa tersedia, tetapi terbatas pada dokumen formal
Ketepatan waktu publikasi	Kurang baik	Sering terjadi keterlambatan dalam publikasi informasi
Kejelasan mekanisme akses	Cukup baik	Tersedia SOP akses informasi, tetapi sosialisasi masih kurang
Variasi media publikasi	Kurang baik	Terbatas pada papan pengumuman dan pertemuan desa

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang mendukung transparansi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah Desa Susukan telah menyediakan informasi dasar tentang Dana Desa, seperti besaran anggaran dan alokasi umum, melalui papan pengumuman di kantor desa dan dalam musyawarah desa. Namun, informasi yang lebih rinci, seperti rincian penggunaan anggaran per item kegiatan dan progres pelaksanaan, masih sulit diakses oleh masyarakat umum.

Keterbatasan media publikasi juga menjadi kendala dalam implementasi transparansi. Pemerintah Desa Susukan masih mengandalkan metode konvensional seperti papan pengumuman dan pertemuan desa, sementara pemanfaatan teknologi informasi masih minimal. Hal ini sejalan dengan temuan Ferarow & Suprihanto (2018) yang mengungkapkan bahwa desa-desa di Indonesia umumnya masih mengandalkan metode konvensional dalam publikasi informasi, yang membatasi jangkauan dan aksesibilitas informasi.

Hasil wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pengelolaan Dana Desa. Temuan ini mengkonfirmasi studi Rahman et al. (2023) yang menemukan bahwa meskipun ada kemajuan dalam transparansi pengelolaan Dana Desa di Indonesia, masih terdapat kesenjangan signifikan antara ketersediaan informasi dan aksesibilitasnya bagi masyarakat

umum. Keterbatasan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa.

### 3. Implementasi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan dianalisis melalui empat indikator utama sebagaimana direkomendasikan oleh Gibson & Hoffman (2021): kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme pertanggungjawaban, responsivitas terhadap feedback masyarakat, dan efektivitas pengawasan.

**Tabel 3. Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan**

Indikator	Implementasi	Keterangan
Kepatuhan terhadap regulasi	Baik	Pemerintah desa mematuhi regulasi formal dalam pengelolaan Dana Desa
Mekanisme pertanggungjawaban	Cukup baik	Laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai ketentuan, namun minimnya sosialisasi kepada masyarakat
Responsivitas terhadap feedback	Kurang baik	Mekanisme feedback masih terbatas dan tidak selalu ditindaklanjuti
Efektivitas pengawasan	Kurang baik	Pengawasan oleh BPD dan masyarakat belum optimal

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Susukan memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi formal dalam pengelolaan Dana Desa. Dokumen-dokumen administratif seperti RKPDesa, APBDDesa, dan laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan temuan Sofyani et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa implementasi akuntabilitas formal di tingkat desa di Indonesia umumnya menunjukkan perkembangan positif dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi.

Namun, akuntabilitas substansial masih menghadapi tantangan signifikan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif kepada pemerintah kabupaten daripada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Temuan ini sesuai dengan studi Ramadhan & Nugroho (2020) yang membedakan antara akuntabilitas formal dan substansial dalam

pengelolaan Dana Desa, dan menemukan bahwa sebagian besar desa di Indonesia lebih menekankan akuntabilitas formal daripada akuntabilitas substansial.

Aspek responsivitas terhadap feedback masyarakat juga menunjukkan kelemahan dalam implementasi akuntabilitas. Mekanisme penyampaian feedback dari masyarakat masih terbatas dan tidak selalu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Beberapa keluhan masyarakat terkait prioritas pembangunan dan kualitas pelaksanaan proyek seringkali tidak mendapatkan respons yang memadai, yang mengindikasikan rendahnya akuntabilitas sosial dalam pengelolaan Dana Desa.

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat juga belum optimal. Hasil wawancara dengan anggota BPD mengungkapkan bahwa mereka sering menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik karena keterbatasan kapasitas maupun ketergantungan politiknya terhadap kepala desa. Temuan ini memperkuat studi Lewis & Hendrawan (2021) yang mengungkapkan bahwa efektivitas pengawasan oleh BPD sangat bergantung pada kapasitas anggotanya dalam memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan desa, serta independensi mereka dari pengaruh kepala desa.

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan analisis, teridentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, yang dapat diklasifikasikan ke dalam faktor pendukung dan penghambat.

**Tabel 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas**

<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
Kerangka regulasi yang komprehensif	Keterbatasan kapasitas aparatur desa
Dukungan pendamping desa	Rendahnya literasi anggaran masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat	Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi
Komitmen kepemimpinan desa	Dinamika politik lokal

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Kerangka regulasi yang komprehensif, seperti UU Desa, Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan berbagai peraturan turunannya, memberikan landasan yang kuat untuk implementasi transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan pendamping desa juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana

Desa. Hal ini sejalan dengan temuan Wang & Rakner (2023) yang mengungkapkan bahwa kerangka regulasi dan pendampingan teknis menjadi faktor kunci dalam mendorong tata kelola yang baik dalam program Dana Desa di Indonesia.

Namun, beberapa faktor penghambat utama juga teridentifikasi. Keterbatasan kapasitas aparatur desa, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan administrasi keuangan, menjadi kendala signifikan. Sebagian besar aparatur desa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan pengelolaan keuangan, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi standar administrasi yang ditetapkan. Hal ini dikonfirmasi oleh studi Furqani & Rosmiaty (2019) yang menemukan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Indonesia.

Rendahnya literasi anggaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan yang efektif. Temuan ini sesuai dengan studi Badrudin & Siregar (2020) yang mengungkapkan bahwa rendahnya literasi anggaran masyarakat menjadi kendala dalam partisipasi pengawasan Dana Desa di Indonesia.

Faktor lain yang signifikan adalah dinamika politik lokal. Relasi kekuasaan dan patronase politik di tingkat desa seringkali mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa dengan jaringan patronase yang kuat cenderung memiliki kontrol yang lebih besar atas proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, yang berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memperkuat temuan Hadiz & Robison (2022) tentang pengaruh elit lokal dan patronase politik terhadap implementasi akuntabilitas yang demokratis dan inklusif di tingkat desa.

## **5. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan. Secara umum, terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat tentang keterlibatan mereka dalam pengelolaan Dana Desa dan realitas praktik di lapangan.

**Tabel 5. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa**

<b>Aspek</b>	<b>Temuan Utama</b>
Pengetahuan Dana Desa	tentang Mayoritas masyarakat mengetahui keberadaan Dana Desa, tetapi minim pemahaman tentang mekanisme pengelolaan
Persepsi transparansi	tentang Sebagian besar masyarakat merasa informasi tentang Dana Desa masih kurang transparan
Persepsi akuntabilitas	tentang Mayoritas masyarakat merasa pemerintah desa belum sepenuhnya akuntabel kepada masyarakat
Tingkat partisipasi dalam perencanaan	Partisipasi terbatas pada elite desa dan tokoh masyarakat
Tingkat partisipasi dalam pengawasan	Rendah, sebagian besar masyarakat bersikap pasif

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Mayoritas masyarakat Desa Susukan mengetahui keberadaan Dana Desa, tetapi pemahaman mereka tentang mekanisme pengelolaannya masih minim. Hanya 30% responden yang memiliki pemahaman yang memadai tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Hal ini mengkonfirmasi studi Antlöv et al. (2016) yang menemukan bahwa meskipun Dana Desa telah diimplementasikan selama beberapa tahun, pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengelolaannya masih terbatas.

Persepsi masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa cenderung negatif. Sebagian besar responden merasa informasi tentang Dana Desa masih kurang transparan dan pemerintah desa belum sepenuhnya akuntabel kepada masyarakat. Namun, persepsi ini juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap manfaat Dana Desa.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan Dana Desa juga masih rendah. Partisipasi dalam musyawarah desa untuk perencanaan Dana Desa umumnya terbatas pada elite desa dan tokoh masyarakat, sementara masyarakat umum cenderung tidak terlibat. Dalam hal pengawasan, sebagian besar masyarakat bersikap pasif dan hanya menjadi penerima informasi, bukan pengawas aktif dalam pengelolaan Dana Desa.

Temuan ini sesuai dengan studi Kosec & Wantchekon (2020) yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan program pembangunan di pedesaan seringkali terhambat oleh asimetri informasi, keterbatasan kapasitas, dan dinamika kekuasaan

lokal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan, seperti pelatihan literasi anggaran dan penguatan organisasi masyarakat sipil.

## **6. Strategi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian, dirumuskan beberapa strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan:

**Tabel 6. Strategi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

<b>Dimensi</b>	<b>Strategi</b>
Regulasi dan Kebijakan	1. Penyempurnaan regulasi desa tentang transparansi informasi 2. Pengembangan SOP akses informasi yang jelas dan mudah diimplementasikan
Kapasitas Kelembagaan	1. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan 2. Penguatan peran BPD dalam pengawasan 3. Optimalisasi peran pendamping desa
Teknologi Informasi	1. Pengembangan sistem informasi desa 2. Pemanfaatan media sosial untuk publikasi informasi
Partisipasi Masyarakat	1. Peningkatan literasi anggaran masyarakat 2. Pengembangan mekanisme feedback yang responsif 3. Penguatan peran organisasi masyarakat sipil

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Strategi pertama berfokus pada penyempurnaan regulasi dan kebijakan di tingkat desa. Desa Susukan perlu mengembangkan peraturan desa yang lebih komprehensif tentang transparansi informasi, termasuk jenis informasi yang harus dipublikasikan, mekanisme akses, dan sanksi bagi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Salim et al. (2017) tentang pentingnya regulasi di tingkat desa untuk mendorong implementasi transparansi dan akuntabilitas.

Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi strategi kedua, yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran BPD, dan optimalisasi pendampingan. Pelatihan bagi aparatur desa tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga pada pemahaman tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini sesuai dengan

rekomendasi Sofyani et al. (2018) tentang pentingnya pengembangan kapasitas dalam mendorong akuntabilitas di tingkat desa.

Strategi ketiga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sistem informasi desa dan pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan aksesibilitas informasi tentang Dana Desa bagi masyarakat. Pratiwi & Pravasanti (2020) mengungkapkan bahwa adopsi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Strategi keempat berfokus pada penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa. Peningkatan literasi anggaran masyarakat, pengembangan mekanisme feedback yang responsif, dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil menjadi komponen penting dalam strategi ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Wang & Rakner (2023), partisipasi masyarakat yang efektif memerlukan tidak hanya akses terhadap informasi, tetapi juga kapasitas untuk menganalisis informasi tersebut dan mekanisme untuk menyampaikan feedback kepada pembuat kebijakan.

Implementasi strategi-strategi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan dinamika sosial-politik di Desa Susukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Olken & Pande (2022), intervensi untuk meningkatkan tata kelola di tingkat lokal perlu disesuaikan dengan konteks spesifik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutannya.

#### 4.2 Perbandingan Dengan State Of The Art

Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Berikut perbandingan temuan penelitian ini dengan state-of-the-art dalam kajian terkait:

**Tabel 7. Perbandingan dengan State-of-the-Art**

<b>Aspek</b>	<b>State-of-the-Art</b>	<b>Penelitian Ini</b>
Fokus Analisis	Mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada aspek formal dan prosedural dari transparansi dan akuntabilitas (Ramadhan & Nugroho, 2020)	Menganalisis aspek formal dan substansial dari transparansi dan akuntabilitas secara komprehensif

Pendekatan Metodologis	Dominasi pendekatan kuantitatif dengan survei terstruktur (Sofyani et al., 2018)	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus mendalam untuk mengungkap nuansa implementasi di tingkat desa
Perspektif Analisis	Cenderung mengadopsi perspektif top-down yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi (Lewis et al., 2020)	Menggabungkan perspektif top-down dan bottom-up dengan memperhatikan dinamika lokal dan partisipasi masyarakat
Konteks	Fokus pada desa-desa agraris atau desa tradisional (Antlöv et al., 2016)	Mengeksplorasi konteks desa peri-urban dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks
Dimensi Analisis	Sebagian besar penelitian menganalisis dimensi tunggal, baik transparansi atau akuntabilitas (Ferarrow & Suprihanto, 2018)	Mengintegrasikan dimensi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu kerangka analisis

Sumber: Disusun dari berbagai literatur, 2024

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang mayoritas berfokus pada aspek formal dan prosedural dari transparansi dan akuntabilitas (Ramadhan & Nugroho, 2020), penelitian ini memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan memperhatikan tidak hanya aspek formal tetapi juga aspek substansial dari transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga mengungkap kompleksitas implementasi di konteks lokal yang spesifik, sebuah aspek yang sering diabaikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat makro dan generalis (Hadiz & Robison, 2022).

Dari segi metodologis, penelitian ini berbeda dari mayoritas studi sebelumnya yang didominasi oleh pendekatan kuantitatif dengan survei terstruktur (Sofyani et al., 2018). Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi kasus mendalam, penelitian ini mampu mengungkap nuansa dan kompleksitas dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas yang sulit ditangkap melalui pendekatan kuantitatif.

Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan perspektif top-down dan bottom-up dalam analisisnya, berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengadopsi perspektif top-down yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi (Lewis et al., 2020). Dengan memperhatikan dinamika lokal dan partisipasi masyarakat, penelitian ini memberikan

pemahaman yang lebih kontekstual tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas diinterpretasikan dan diimplementasikan di tingkat desa.

Konteks penelitian ini juga memberikan kebaruan, karena mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada desa-desa agraris atau desa tradisional (Antlöv et al., 2016). Dengan mengeksplorasi konteks desa peri-urban dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Dimensi analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang sebagian besar menganalisis dimensi tunggal, baik transparansi atau akuntabilitas secara terpisah (Ferarrow & Suprihanto, 2018). Dengan mengintegrasikan dimensi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu kerangka analisis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang tata kelola pemerintahan desa.

Kontribusi penting lainnya adalah identifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas, seperti dinamika politik lokal dan relasi kekuasaan di tingkat desa, yang sering diabaikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada faktor-faktor struktural dan institusional (Wang & Rakner, 2023).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini telah mengkaji implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat kerangka regulasi yang komprehensif. Dari aspek transparansi, aksesibilitas informasi dan kejelasan mekanisme akses sudah cukup baik, namun ketepatan waktu publikasi dan variasi media publikasi masih kurang optimal. Dari aspek akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban sudah cukup baik, namun responsivitas terhadap feedback masyarakat dan efektivitas pengawasan masih kurang optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas dapat dibagi menjadi faktor pendukung (kerangka regulasi yang komprehensif, dukungan pendamping desa, peningkatan kesadaran masyarakat, dan komitmen kepemimpinan desa) dan faktor penghambat (keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya literasi anggaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan dinamika politik lokal).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa juga masih rendah, yang disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa dan kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif.

Temuan penelitian ini berimplikasi pada perlunya strategi komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meliputi penyempurnaan regulasi dan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur tata kelola pemerintahan desa dengan mengintegrasikan dimensi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu kerangka analisis, serta mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual yang seringkali diabaikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan, mengingat pendekatan studi kasus tunggal yang digunakan. Untuk itu, penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan komparatif diperlukan untuk memvalidasi temuan dan mengembangkan model tata kelola pemerintahan desa yang lebih komprehensif dan kontekstual.

## DAFTAR REFERENSI

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- ArRugby, M., & Tarigan, S. (2021). Transparency and accountability as pillars of good governance: Evidence from village fund management in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3), 167-185. <https://doi.org/10.5296/jpag.v11i3.18763>
- Aziz, N. L. L., & Humaira, A. (2020). Democratisation and new rural development agenda in Indonesia. *Politics and Policy*, 48(5), 841-877. <https://doi.org/10.1111/polp.12376>
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2020). The evaluation of village fund allocation: A case study in the villages of Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 3(1), 42-55. <https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10618>
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2020). The evaluation of village fund allocation: A case study in the villages of Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 3(1), 42-55. <https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10618>
- Barrera-Osorio, F., Fasih, T., Patrinos, H. A., & Santibáñez, L. (2019). *Decentralized decision-making in schools: The theory and evidence on school-based management*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9883-7>
- Bowen, G. A. (2019). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781526421036858333>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fanani, Z., & Munandar, A. (2023). Examining fiscal decentralization effects on rural development: Evidence from Indonesia's Village Fund policy. *World Development*, 165, 106121. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106121>
- Faedlulloh, D., Irawan, B., & Prasetyanti, R. (2019). Political linkage management in village development policy implementation in Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 12(3), 334-347. <https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1471405>
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2018). Good village governance: Transparency and accountability of village fund management. *Journal of Accounting and Investment*, 19(1), 11-20. <https://doi.org/10.18196/jai.190189>
- Ferry, L., Eckersley, P., & Zakaria, Z. (2015). Accountability and transparency in English local government: Moving from 'matching parts' to 'awkward couple'? *Financial Accountability & Management*, 31(3), 345-361. <https://doi.org/10.1111/faam.12060>
- Flyvbjerg, B. (2016). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219-245. <https://doi.org/10.1177/1077800405284363>
- Fusch, P., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2018). Denzin's paradigm shift: Revisiting triangulation in qualitative research. *Journal of Social Change*, 10(1), 19-32. <https://doi.org/10.5590/JOSC.2018.10.1.02>
- Furqani, A., & Rosmiaty, M. (2019). Challenges in implementing transparency and accountability in village financial management in Indonesia. *International Journal of Public Administration in Developing Countries*, 4(2), 73-90. <https://doi.org/10.24294/ijpadc.v4i2.1154>
- Gibson, J., & Hoffman, B. (2021). Fiscal decentralization and local development: Governance dimensions in Indonesia's rural transformation. *World Development Perspectives*, 21, 100291. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100291>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2022). Elite capture and village fund governance in Indonesia: Power asymmetries and local resistance. *Journal of Contemporary Asia*, 52(3), 423-446. <https://doi.org/10.1080/00472336.2021.1956366>
- Hartono, D., Jaya, W. K., & Tirtosuharto, D. (2020). Decentralization policy and equality: A thematic review of literature. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(2), 157-178. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.56>
- Hertzberg, L., & Monteiro, E. (2022). A comparative case study approach to analyzing governance innovations in rural communities. *Journal of Rural Studies*, 89, 287-299. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.01.006>
- Holzhaecker, R. L., Wittek, R., & Woltjer, J. (2016). *Decentralization and governance in Indonesia*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3>
- Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., & Mills, J. (2017). Case study research: Foundations and methodological orientations. *Forum: Qualitative Social Research*, 18(1), Art. 19. <https://doi.org/10.17169/fqs-18.1.2655>

- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). System implementation of village financial management. *Jurnal Sistem Informasi*, 12(2), 86-97. <https://doi.org/10.21609/jsi.v12i2.473>
- Iphofen, R., & Tolich, M. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research ethics*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781526435446>
- Jamal, E., & Bulan, S. G. I. (2021). Evaluation of village fund program for rural infrastructure development and community empowerment in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(1), 62-78. <https://doi.org/10.29244/jekp.10.1.62-78>
- Kasim, H., Rahmawati, F., & Kurniasari, D. (2022). Political economy of village fund policy implementation in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 44(3), 194-213. <https://doi.org/10.1080/23276665.2022.2113693>
- Kosec, K., & Wantchekon, L. (2020). Can information improve rural governance and service delivery? *World Development*, 125, 104376. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.07.017>
- Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), 347-359. <https://doi.org/10.1002/pad.1741>
- Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2021). The impact of majority-elite policy congruence on village spending in Indonesia. *European Journal of Political Economy*, 68, 101992. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.101992>
- Lewis, B. D., McCulloch, N., & Sacks, A. (2020). Measuring local government performance in Indonesia: The role of fiscal capacity and corruption. *Development Policy Review*, 38(6), 800-820. <https://doi.org/10.1111/dpr.12466>
- Mahmuddin, M., Soesanto, A. D., & Masyhur, F. (2022). Building village governance through transparency and accountability: Lessons from Indonesia's village fund program. *Journal of Rural Studies*, 92, 64-78. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.03.013>
- Murti, D. W., & Firmansyah, R. (2021). Digital village: Enhancing rural development through information and communication technology in Indonesia. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23(5), 465-483. <https://doi.org/10.1108/DPRG-11-2020-0158>
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23-48. <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>
- Mohammad, S., & Zhuang, T. (2021). Methods for studying local governance: A multi-strategy approach to village case studies. *Local Government Studies*, 47(4), 605-625. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1884733>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Olken, B. A., & Pande, R. (2022). Governance and development: New frontiers. *Annual Review of Development Economics*, 14, 387-413. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051520-013610>
- Olsen, J. P. (2017). *Democratic accountability, political order, and change: Exploring accountability processes in an era of European transformation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198800606.001.0001>

- Parker, A., & Tritter, J. (2016). Focus group method and methodology: Current practice and recent debate. *International Journal of Research & Method in Education*, 29(1), 23-37. <https://doi.org/10.1080/01406720500537304>
- AGP., & Palupiningtyas, Dyah. (2024). Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*, 17(2), 73-81. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.1906>
- Pellegrini, L., & Tasciotti, L. (2019). The Indonesia Village Fund: Fiscal transfers for rural development in the world's largest Muslim country. *Journal of Rural Studies*, 70, 282-293. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.04.001>
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Digital village: Information system development and accountability of village fund. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(3), 3159-3162. <https://doi.org/10.21275/v9i3.20201075>
- Rahayu, D., & Juwono, V. (2019). Village fund transparency and its impact on community trust: Evidence from Central Java. *Public Administration Issues*, 42(6), 192-213. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2019-0-6-192-213>
- Rahman, F., Sulistiadi, W., & Malawat, M. (2023). Digital transformation in village governance: Opportunities and challenges in implementing e-village budgeting in Indonesia. *Digital Government: Research and Practice*, 4(2), 1-18. <https://doi.org/10.1145/3589608>
- Ramadhan, P., & Nugroho, L. (2020). From formal to substantial accountability in village governance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 43(13), 1119-1131. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672180>
- Salim, A., Bulan, W. R., Untung, B., Laksono, I., & Brock, K. (2017). Indonesia's Village Law: Enabler or constraint for more accountable governance? *Making All Voices Count Research Report*, Brighton: IDS. <https://doi.org/10.35648/20.500.12413/11781/ii306>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). *Research methods for business students* (7th ed.). Pearson Education. <https://doi.org/10.1108/qmr.2000.3.4.215.2>
- Sayuti, M., Rahmawati, T., & Maryana, R. (2023). Participatory village development: Community involvement in village fund management in Indonesia. *Community Development Journal*, 58(3), 502-523. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsac044>
- Smith, B. (2018). Generalizability in qualitative research: Misunderstandings, opportunities and recommendations for the sport and exercise sciences. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 10(1), 137-149. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2017.1393221>
- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 years of performance measurement system (PMS) implementation in Indonesian local governments: Why is their performance still poor? *Asian Journal of Business and Accounting*, 11(1), 151-184. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6>
- Schmitter, L., & Karkkainen, G. (2016). Beyond formal frameworks: The social dynamics of transparency and accountability. *Governance*, 29(3), 431-450. <https://doi.org/10.1111/gove.12205>
- Srikant, M., & Samadara, S. (2018). Case study methodology for understanding local governance: A critical perspective. *Qualitative Research Journal*, 18(3), 248-261. <https://doi.org/10.1108/QRJ-12-2017-0072>

- Steiner, R. (2017). The implications of community participation in local governance processes: A critical review. *Development Policy Review*, 35(4), 531-543. <https://doi.org/10.1111/dpr.12267>
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2021). Village fund transparency: The role of accountability and community participation. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(3), 133-140. <https://doi.org/10.32479/ijefi.11250>
- Sulistiowati, R., Syamsudin, & Widiarto, A. E. (2019). Village authority based on indigenous right and local scale authority: Implications of Law No. 6/2014 toward village authority. *Mimbar Hukum*, 31(2), 177-190. <https://doi.org/10.22146/jmh.32165>
- Tohani, E., & Mulyoto, Y. (2022). Enhancing village community capacity in monitoring village development programs in Indonesia. *Rural Society*, 31(3), 244-262. <https://doi.org/10.1080/10371656.2022.2115536>
- Wang, L., & Rakner, S. (2023). Good governance in rural development: Theory and practice from Indonesia's village fund program. *World Development*, 163, 106110. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106110>
- Welch, E. W., & Sanders, L. G. (2019). Transparency in digital governance: A multi-dimensional approach to citizen-state interactions. *Public Administration Review*, 79(5), 683-695. <https://doi.org/10.1111/puar.13034>
- Yin, R. K., & Zietlow, T. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473915480>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). The influence of internal control system on the financial accountability of elementary schools in Bandung, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(10), 131-140. <https://doi.org/10.7176/RJFA/7-10-14>
- Yanuardi, Supriyadi, A., & Ahmar, N. (2021). A critical evaluation of village financial management accountability in Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 6(2), 82-95. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2021.006.02.7>